

PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING* 14%

Mohammad Teja

25

Abstrak

Tanggal 7 Juli 2022 menjadi puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29. Seperti tahun sebelumnya, tema yang diangkat adalah pencegahan *stunting*. Kekurangan gizi kronis yang menyebabkan *stunting* menjadi persoalan saat ini dan masa depan. Dampak *stunting* tidak hanya gagal tumbuh, melainkan juga akan memengaruhi kesehatan jiwa dan mental, bahkan kecerdasan intelektual. Meskipun penurunan prevalensi *stunting* terjadi setiap tahun, tetapi dalam jangka waktu 2,5 tahun, pemerintah perlu bekerja keras untuk mencapai target. Tulisan ini membahas upaya mempercepat penurunan prevalensi *stunting*. Pelibatan kementerian dan lembaga dalam mendorong, memodifikasi, dan memperluas jangkauan wilayah kerja tentu memerlukan dukungan dan anggaran yang cukup dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam monitoring dan evaluasi kemajuan program, penting ketersediaan data yang tepat dan akurat oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat menjadi pendeteksi awal penanganan *stunting* dengan melakukan kegiatan pemantauan pertumbuhan yang dilakukan secara rutin. DPR RI perlu memastikan pemerintah menyediakan anggaran dan program yang mendukung penanggulangan *stunting* di setiap kementerian dan lembaga.

Pendahuluan

Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang diperingati pada setiap tanggal 29 Juni merupakan perwujudan arti penting keluarga dalam upaya memperkuat ketahanan nasional. Tahun ini, Harganas menjadi momentum untuk membantu percepatan penurunan *stunting*, sebagaimana tema yang diusung, yaitu “Ayo cegah *stunting* agar keluarga bebas *stunting*”. Tema ini diangkat karena *stunting* masih

menjadi permasalahan bagi anak balita di Indonesia. Malnutrisi kronis ini menjadi tanggung jawab besar Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang menargetkan angka *stunting* menjadi 14% pada akhir masa pemerintahannya. Secara nasional, angka prevalensi *stunting* masih sebesar 24,4%, jauh di atas batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu di bawah 20% (kemdikbud.go.id, 14 April 2022).

Bukan hanya sekedar kuantitas



target, komitmen percepatan penurunan *stunting* didasari pemahaman bahwa permasalahan *stunting* adalah masalah yang serius. *Stunting* merupakan kondisi gagal pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak balita akibat kekurangan gizi sejak di dalam kandungan, yang ditandai dengan tubuh lebih pendek atau kerdil dibandingkan anak seusianya. Kondisi *stunting* akan memperburuk kondisi kesehatan anak balita. Dalam beberapa kasus, *stunting* akan mengakibatkan anak balita mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif optimal seperti kesulitan berbicara, berjalan, hingga sering mengalami sakit. Bisa dikatakan, *stunting* mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk membahas upaya mempercepat penurunan prevalensi *stunting*.

Kondisi *Stunting* dan Faktor Penyebabnya

Setiap tahunnya, Indonesia telah mengalami penurunan angka prevalensi *stunting*. Akan tetapi, angka prevalensi *stunting* saat ini masih jauh dari target 14% yang harus dicapai pada tahun 2024 atau sebanyak 5,33 juta balita yang masih mengalami *stunting*. Pada tahun 2013, angka prevalensi *stunting* berada pada angka 37,2%. Lima tahun berikutnya, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 30,8%. Pada tahun 2019, *stunting* juga mengalami penurunan menjadi 27,7%. Oleh karena tidak ada pendataan, angka prevalensi *stunting* di Indonesia

pada tahun 2020 diperkirakan turun menjadi 26,92%. Penurunan angka tersebut diprediksi sebesar 0,75% dibandingkan dengan tahun 2019 (27,67%). Pada tahun 2021, angka prevalensi *stunting* sebesar 24,4% (kemkes.go.id, 28 Desember 2021).

Jika dilihat per provinsi, mengacu pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan prevalensi *stunting* tertinggi, yaitu 37,8%. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (31,4%), dan Sulawesi Tenggara (30,2%). Sementara jika dilihat per kabupaten, mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kabupaten dengan prevalensi balita *stunting* tertinggi di Indonesia adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (cnnindonesia.com, 23 Maret 2022). Berdasarkan SSGI 2021, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai 48,3% (kemkes.go.id, 28 Desember 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah lebih banyak menyumbang kasus *stunting* dibanding daerah lainnya.

Penting diketahui bagaimana *stunting* bisa terjadi dan terus meningkat, bahkan pada saat teknologi dan ketersediaan fasilitas kesehatan sudah “dekat” dan “mudah” diakses masyarakat. Kondisi gagal tumbuh pada balita yang kekurangan gizi kronis, bahkan sejak si anak sudah berada dalam kandungan, seribu hari pertama kehidupan, hingga anak berusia 23 bulan. Penyebabnya

multidimensi, tidak hanya faktor kesehatan, melainkan juga faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya asupan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, faktor keluarga, mulai dari ketidakadekuatan praktik pemberian makan, praktik pemberian ASI, infeksi penyakit serta pola pengasuhan anak. Faktor eksternal, yaitu masyarakat dan lingkungan sekitar, di samping terbatasnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, akses air bersih, dan sanitasi lingkungan, ikut menjadi faktor yang berpengaruh.

Penguatan Upaya Penurunan *Stunting*

Usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* berpedoman pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) periode 2018-2024, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam Perpres ini diatur mengenai strategi nasional percepatan penurunan *stunting*; penyelenggaraan penurunan *stunting*; koordinasi penyelenggaraan penurunan *stunting*; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pendanaan.

Komitmen (bappenas.go.id, 12 Juli 2022) ini telah dirancang untuk menuntaskan masalah *stunting* yang multidimensional. Komitmen ini membutuhkan kerja sama dan koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta menuntut kontribusi tidak hanya dari sektor kesehatan, tetapi juga nonkesehatan. Termasuk di dalamnya penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, pendidikan

dan pengetahuan tentang gizi seimbang dan pola asuh anak, pemberian makanan bayi serta penguatan perlindungan sosial kelompok rentan. Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor ini perlu dipastikan konvergensinya dari tingkat pusat sampai tingkat desa agar tepat sasaran serta menjangkau seribu hari pertama kehidupan, yaitu rumah tangga dengan ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan, ibu menyusui, dan anak 24-59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin.

Upaya penurunan *stunting* dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi spesifik yang mengatasi penyebab langsung dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Upaya ini diperkuat dengan prasyarat pendukung yang terdiri dari dukungan teknis, kegiatan pendampingan, komitmen politik, kebijakan, serta keterlibatan pemerintah dan lintas sektor.

Mengacu pada Strategi Nasional 2018-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, bentuk intervensi spesifik dengan sasaran prioritas ibu hamil diwujudkan dengan memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik, dan pemberian suplemen tablet tambah darah. Upaya ini didukung dengan pemberian suplemen kalsium dan pemeriksaan kehamilan. Selanjutnya untuk ibu menyusui dan anak 0-23 bulan, intervensi dilakukan dengan memberikan konseling dan promosi pemberian ASI

eksklusif, pemberian makanan bayi, penatalaksanaan gizi buruk, pemberian makanan tambahan bagi anak kurang gizi, pemantauan dan promosi pertumbuhan dengan pemberian dukungan suplemen vitamin A, suplemen bubuk tabur gizi, imunisasi, dan suplementasi zinc untuk pengobatan diare. Selain itu, untuk remaja putri, wanita usia subur, dan anak usia 24-59 bulan, intervensi dilakukan dengan memberikan suplemen tablet tambah darah, penatalaksanaan gizi buruk, makanan tambahan untuk pemulihan gizi kurang, serta pemantauan dan promosi pertumbuhan.

Sementara untuk intervensi sensitif, percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui dua kelompok intervensi. *Pertama*, peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi melalui kegiatan penyediaan akses air bersih dan air minum. *Kedua*, penyediaan akses sanitasi yang layak melalui kerja sama kementerian dan lembaga yang terlibat, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Lebih lanjut, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dilakukan melalui penyediaan akses jaminan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemberian akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), bantuan uang tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media, penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, serta konseling

pengasuhan untuk orang tua, juga ketersediaan pelayanan pendidikan anak usia dini, pemantauan tumbuh kembang anak, ketersediaan konseling kesehatan reproduksi remaja serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan akses pangan dan gizi juga dilakukan melalui bantuan akses pangan keluarga kurang mampu dengan program BPNT dan program sembako, fortifikasi bahan makanan utama seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng.

Strategi percepatan penurunan *stunting* lainnya dilakukan dengan menyediakan data prevalensi *stunting* melalui sistem pendataan yang akurat. Sejak tahun 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan BPS melakukan survei pengukuran SSGI, yaitu pengukuran *stunting*/kerdil, *wasting*/kurus, dan *underweight*/berat badan kurang tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil survei menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan dana insentif daerah kabupaten/kota serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Upaya penguatan lain dilakukan dengan mengaktifkan kembali fungsi Posyandu yang sebelumnya terhenti akibat pandemi Covid-19. Posyandu merupakan pusat kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di lingkungan sekitar Posyandu. Kegiatan tersebut termasuk penimbangan anak balita setiap bulannya sebagai upaya dini mendeteksi *stunting* dan pencegahannya. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah

dalam mendorong kader-kader Posyandu dalam memberikan perhatian khusus terhadap tumbuh kembang anak merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian target *stunting* 14 persen pada 2024. Penguatan juga perlu dilakukan di tingkat puskesmas melalui peningkatan kegiatan surveilans gizi, penemuan, dan penanganan kasus gizi. Surveilans meliputi pengumpulan data, pengolahan, dan diseminasi informasi. Data diperoleh dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemantauan status gizi, pelaporan kasus, survei dan lainnya. Surveilans juga perlu diperkuat dengan menggunakan teknologi agar pelaporan dari kader masyarakat dapat segera diketahui sehingga kasus dapat cepat diintervensi oleh tenaga kesehatan. Upaya penguatan lainnya adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk mengenali masalah *stunting* di sekitarnya.

Penutup

Target nasional yang ditetapkan sebesar 14% akan dapat dicapai dengan komitmen yang kuat dalam tujuan pembangunan dan penurunan *stunting* secara bersama antara kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Komitmen tersebut antara lain mendorong perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa; meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan penguatan serta pengembangan sistem data,

informasi, riset, dan inovasi. Usaha lain yang berdampak langsung pada penanggulangan *stunting* adalah dengan kehadiran puskesmas dan posyandu melalui Gerakan 1000 hari pertama kehidupan dengan pemenuhan gizi seimbang. Ini hanya dimungkinkan jika pengetahuan ibu, bapak, keluarga, dan masyarakat sudah sadar tentang pentingnya gizi seimbang bagi remaja putri, ibu hamil, dan balita. Literasi gizi keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah *stunting* untuk memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. DPR RI perlu memastikan pemerintah menyediakan anggaran dan program penanggulangan *stunting* di setiap kementerian dan lembaga. Dengan melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap program-program pemerintah diharapkan program yang direncanakan tepat sasaran dan berdampak langsung dalam penurunan angka *stunting*.

Referensi

- “Angka *Stunting* Timor Tengah Selatan NTT Tertinggi Se-Indonesia”, 23 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220323124850-20-775074/angka-stunting-di-timor-tengah-selatan-ntt-tertinggi-se-indonesia>, diakses 5 Juli 2022.
- Bappenas. *Turunkan Stunting di Angka 14 Persen di 2024, Menteri Suharso Dorong Kerja Sama Lintas Sektoral*, 18 Desember 2019, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/turunkan-stunting-di-angka-14-persen-di->

2024-menteri-suharso-dorong-kerja-sama-lintas-sektoral, diakses 12 Juli 2022.

Kementerian Kesehatan. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*, 28 Desember 2021, <https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>, diakses 9 Juli 2022.

“Prevalensi *Stunting* Indonesia 2022 Masih di Atas Standar WHO, 37% Pasangan Usia Subur Alami Anemia”, 14 April 2022, <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/prevalensi-stunting-indonesia-2022-masih-diatas-standar-who-37-pasangan-usia-subur-alami-anemia?id=812&ix=11>, diakses 5 Juli 2022.



Mohammad Teja
teja@dpr.go.id

Mohammad Teja, S.Sos., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jayabaya jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2000 dan pendidikan Magister (S2) Magister Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Sosiologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: “Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia sebagai Instrumen Pengendali dalam Pembangunan Berkelanjutan” (2013), “Peran CSR Dalam Upaya Meredam Konflik Sosial” (2015), “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin di Pesisir Pantai” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.